

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PAREPARE DI KOTA PAREPARE**

Uhud Darmawan Natsir

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : uhud.darmawan.natsir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Kota Parepare. Populasinya adalah seluruh laporan keuangan daerah yang menyangkut penerimaan APBD Pemda kota Parepare selama lima tahun terakhir dan sampelnya adalah data target dan realisasi APBD Pemda kota Parepare pada lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rumus efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan APBD Kota Parepare berdasarkan hasil analisis tahun 2010 sebesar 85,01%, tahun 2011 sebesar 82,00%, tahun 2012 sebesar 88,49%, tahun 2013 sebesar 95,00% dan tahun 2014 sebesar 102,21% berada pada interval 90%-100%, dimana berdasarkan interval/rentang pengkategorian yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare tergolong dalam kategori efektif.

Kata Kunci : Tingkat Efektivitas dan Penerimaan APBD

**ANALYSIS EFFECTIVENESS
OF BUDGET REVENUE AND EXPENDITURE
PARE PARE CITY GOVERNMENT**

Uhud Darmawan Natsir

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : uhud.darmawan.natsir@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the level of effectiveness of Budget Revenue and Expenditure Pare Pare city government. The population is all financial statement areas involving local government budget receipts town of Pare Pare during the last five years and the sample is the target data and the realization of the local government budget town of Pare Pare on the last five years. Data collection techniques used were documentation and interviews. Data analysis techniques performed by using analysis of the effectiveness of the formula. The results showed that the level of effectiveness of expenditure and revenue receipts town of Pare Pare area based on an analysis of 2010 amounted to 85.01%, in 2011 amounted to 82.00%, in 2012 amounted to 88.49%, in 2013 amounted to 95.00%, and in 2014 amounted to 102.21% at intervals of 90 %-100 %, which is based on interval/range preset categorization shows that the level of effectiveness of expenditure and revenue receipts town of Pare Pare area classified in the category of effective.

KeyWords: Level of Effectiveness and Revenue Budgets

PENDAHULUAN

Munculnya Otonomi Daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Struktur APBD yang merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Sebagai salah satu daerah yang diberikan otonomi oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yakni Pemda Kota Parepare, diharapkan dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan daerahnya sebagai rangkaian program pemerintah yang dilaksanakan terus-menerus yang mana memerlukan biaya yang besar walaupun dengan keterbatasan dana. Untuk itu pendapatan daerah diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi pengeluaran atau belanja daerah yang juga semakin meningkat. Dalam kaitan inilah, maka dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah perlu dikembangkan secara lebih efisien dan efektif.

Selanjutnya realisasi Pendapatan Daerah Kota Parepare selama lima tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Tahun Anggaran	Target APBD	Perkembangan (%)	Realisasi APBD	Perkembangan (%)
2010	497.002.404.415,00	-	422.485.397.839,81	-
2011	589.622.580.566,00	18,64	483.240.241.270,12	14,38
2012	602.079.669.374,55	2,11	532.812.918.945,64	10,26
2013	648.995.986.536,27	7,79	614.513.936.577,34	15,33
2014	695.135.725.888,00	7,11	710.496.023.652,70	15,62

Sumber: Data APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Pemda Kota Parepare.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Supriyono (2000 : 29), mengemukakan pengertian efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Selanjutnya Siagian (2001 : 24) berpendapat bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Mahmudi (2005 : 92) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Selanjutnya menurut Emerson yang dikutip Handyaningrat (2001 : 140) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti dicapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kurniawan (2005 : 109) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pengukuran prestasi kerja yang telah dicapai dalam suatu organisasi atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai. Dimana untuk mencapai efektivitas dari sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya suatu organisasi harus memiliki kemampuan yang profesional dimana mampu untuk merencanakan dan melaksanakan segala sesuatunya dengan baik serta pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana yang efektif demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam sebuah organisasi.

Pengertian Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal. Rencana-rencana tersebut disusun secara baik yang nantinya bakal dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara/Daerah. Oleh karena itu, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan Keuangan Negara atau Daerah perlu dibuat penyusunan dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Pada dasarnya anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Anggaran daerah juga berarti jumlah penerimaan dan pengeluaran oleh daerah propinsi atau kabupaten/kota yang telah disahkan oleh DPRD propinsi atau kabupaten/kota (Glosarium Ekonomi, 2003). Untuk dapat memahami pengertian tentang anggaran daerah lebih jelas, berikut dikemukakan berupa pengertian tentang anggaran daerah dari para ahli.

Menurut Sabeni (2001 : 39), anggaran merupakan jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Halim (2007 : 19), mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut, untuk suatu periode tertentu yang umumnya satu tahun.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran dan dalam pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan begitu pula dengan pelaksanaan APBD.

Fungsi dan Prinsip Anggaran

Fungsi anggaran adalah mengalokasikan dana-dana kepada badan-badan pemerintah daerah sehemat mungkin. Melalui anggaran daerah dapat dilakukan supervise dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana, sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Adapun fungsi anggaran menurut Mardiasmo (2002 : 63) yaitu:

1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan (*planning tool*)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*)
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik (*political tool*)
Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)
Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)
Anggaran merupakan wujud komitmen *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat penciptaan ruang publik (*public sphere*)
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Yani (2009 : 371) mengungkapkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas

dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kemudian menurut Widjaja (2012 : 148) mengemukakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Selanjutnya Undang-Undang No.25 tahun 1999 pasal 4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : a) hasil pajak daerah; b) hasil retribusi daerah; c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan; d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.

Pengertian Belanja Daerah

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Mahmudi (2010 : 155) menyatakan bahwa belanja daerah dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.

Kemudian menurut PP RI No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja yaitu, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengemukakan pengertian belanja negara yaitu, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Sedangkan pengertian belanja daerah yaitu, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Sedangkan Yani (2009 : 372) mengemukakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar, depresi aktiva atau timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat).

Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka diajukan hipotesis untuk jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian yaitu bahwa penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2014 Pemda Kota Parepare kurang efektif.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pada suatu penelitian, variabel merupakan salah satu unsur penting. Oleh karena itu setiap peneliti harus mengetahui variabel dari masalah yang akan diteliti. Adapun

variabel pada penelitian ini adalah efektivitas penerimaan APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Pemda Kota Parepare.

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan batasan-batasan operasional yang dipakai untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsir variabel yang akan diteliti, berikut ini dikemukakan definisi operasional variabel yang akan diteliti, yaitu:

1. Efektivitas adalah keberhasilan atau kemampuan merealisasikan penerimaan dan belanja sesuai dengan target APBD yang ditetapkan selama lima tahun anggaran (tahun 2010-2014) yang dinyatakan dalam rupiah.
2. Target APBD adalah merupakan perumusan awal perhitungan jumlah penerimaan APBD yang akan direalisasikan dalam tahun anggaran tertentu (biasanya satu tahun anggaran).
3. Penerimaan APBD Tahun Anggaran 2010-2014 adalah besarnya penerimaan yang direalisasikan berdasarkan rencana penerimaan APBD untuk setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
4. Efektivitas penerimaan APBD adalah realisasi APBD yang dicapai harus sesuai dengan target/rencana yang telah ditetapkan.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dapat diketahui melalui perbandingan antara target dan realisasi yang kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori persentase tertentu dan alat ukur variabel tersebut adalah persentase.

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data laporan keuangan daerah yang menyangkut penerimaan dan target APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Pemda Kota Parepare.

Sampel

Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah data target dan realisasi APBD Pemda Kota Parepare pada lima tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2010-2014.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang sehubungan dengan data yang dibutuhkan pada instansi pemerintah daerah yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah penerimaan APBD Pemda Kota Parepare yaitu pada kantor Dispenda Kota Parepare.
2. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pegawai kantor Dispenda Kota Parepare yang dianggap berkompeten untuk memberikan data dan informasi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara rencana dan realisasi dari APBD selama tahun anggaran yang dianalisa digunakan rumus efektivitas (Halim, 2004 : 129) sebagai berikut:

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Hasil Nyata}}{\text{Sasaran}} \times 100\%$$

Dimana :

Hasil Nyata : Realisasi anggaran pada tahun t

Sasaran : Target anggaran pada tahun t

Selanjutnya adapun penjabaran rumus diatas adalah sebagai berikut:

Diatas 100 % = Sangat Efektif

90 % - 100 % = Efektif

80 % - 90 % = Cukup Efektif

60 % - 80 % = Kurang Efektif

Kurang dari 60 % = Tidak Efektif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Data target dan realisasi pendapatan daerah Kota Parepare selama lima tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2010-2014 dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel2.

Data Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Rincian Pendapatan	Tahun Anggaran									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pendapatan Daerah	497.002	422.485	589.622	483.240	602.079	532.812	648.995	614.513	695.135	710.496
PAD	44.547	39.486	55.204	36.051	67.757	51.181	87.053	72.462	86.131	110.484
Pajak Daerah	6.150	6.661	8.689	10.048	10.806	12.162	14.000	14.987	18.575	19.911
Retribusi Daerah	29.882	25.279	33.004	19.033	8.421	8.046	10.587	9.552	7.689	8.892
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.625	1.672	1.706	2.786	2.738	2.738	3.000	2.753	3.000	3.128
Lain-Lain PAD yang Sah	6.890	5.874	11.805	4.184	45.792	28.235	59.466	45.170	56.867	78.553
Dana Perimbangan	354.229	318.683	398.230	332.672	415.255	411.474	465.309	455.852	476.229	480.140
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.779	28.870	92.257	26.871	32.433	28.547	35.415	25.958	17.338	21.249
Dana Alokasi Umum	267.936	266.299	276.567	276.396	332.459	332.564	384.096	384.096	426.406	426.406
Dana Alokasi Khusus	23.514	23.514	29.406	29.405	50.363	50.363	45.798	45.798	32.485	32.485
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	98.226	64.316	136.188	114.517	119.067	70.157	96.633	86.199	132.775	119.872

Sumber :Data APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kota Parepare selama lima tahun terakhir secara rill mengalami terus peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun ternyata pencapaian atau realisasi pendapatan daerah Kota Parepare dalam empat tahun anggaran yang diteliti yaitu Tahun Anggaran 2010-2013 tidak mencapai target pendapatan yang telah ditentukan, dan pada Tahun Anggaran 2014 realisasi pendapatan daerah Kota Parepare justru dapat melampaui target pendapatan yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya penerimaan daerah yang masuk dari beberapa pos-pos atau sumber pendapatan daerah yang jumlahnya sangat jauh dibawah target yang ditentukan.

Sebagai salah satu contoh yaitu pos Retribusi Daerah, dimana salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pemasukan daerah dari RSUD Andi Makkasau Parepare. Misalnya pada tahun anggaran 2011 pendapatan yang diperoleh dari RSUD A. Makkasau hanya sebesar Rp. 11.721.750.086,00 atau 46,88 % dari target Rp. 25.001.360.000,00, hal ini berarti terdapat sekitar 13,28M target pendapatan yang tidak tercapai pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena sektor ini merupakan sektor

yang tingkat pendapatannya tidak menentu karena besar kecilnya tingkat pendapatan RSUD tersebut tergantung dari banyak tidaknya jumlah orang yang berobat. Begitupun misalnya dari sektor parkir, dimana pendapatan daerah dari sektor ini juga tidak menentu jumlahnya tergantung dari banyak tidaknya orang yang memakai jasa tersebut. Oleh karena itu pos Retribusi Daerah merupakan salah satu pos yang menyebabkan tidak tercapainya target pada Tahun Anggaran 2010-2013 tersebut.

Selain itu, pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga merupakan salah satu pos yang menyebabkan tidak tercapainya target anggaran pada tahun anggaran yang diteliti. Hal ini dapat dilihat pada tahun anggaran 2012 dimana pencapaian target pendapatan dari pos ini sangat jauh dari target pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu hanya sebesar Rp. 28.235.671.391,78 atau 61,66% dari target Rp. 45.792.205.000,00 yang berarti terdapat sekitar 17,55M target pendapatan yang tidak tercapai.

Maka daripada itu pemerintah daerah kemudian berupaya mengoptimalkan pos-pos atau sumber pendapatan daerah yang tidak mencapai target tersebut dengan cara memperbaiki manajemennya dan meninjau kembali kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, misalnya apakah target yang diberikan terlalu tinggi, metode pengumpulan anggaran yang kurang optimal, atau bahkan adanya kebocoran anggaran sehingga menyebabkan target tidak dapat tercapai pada tahun anggaran tersebut. Sehingga terbukti pada Tahun Anggaran 2014 pendapatan daerah Kota Parepare dapat melampaui target pendapatan yang telah ditentukan.

Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Perkembangan realisasi APBD selama lima tahun anggaran secara tidak langsung akan menggambarkan bagaimana kegiatan-kegiatan pelaksanaan APBD selama lima tahun anggaran yang dianalisa. Perkembangan APBD menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2014 telah mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif. Dimana beberapa tahun anggaran mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan realisasi APBD tahun lainnya, dan adapula yang mengalami persentase kenaikan yang kecil. Gambaran mengenai perkembangan realisasi APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.

Perkembangan Realisasi APBD
Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Tahun Anggaran	Realisasi	Kenaikan	
		Jumlah	Persentase
2010	422.485.397.839,81	-	-
2011	483.240.241.270,12	60.754.843.430,31	14.38
2012	532.812.918.945,64	49.572.677.675,52	10.26
2013	614.513.936.577,34	81.701.017.632,00	15.33
2014	710.496.023.652,70	95.982.087.075,36	15.62

Sumber: Data APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Berdasarkan data tabel 3 dapat dijelaskan bahwa persentase perkembangan tertinggi pada realisasi APBD Kota Parepare adalah yang dicapai pada tahun 2014 yaitu Rp.710.496.023.652,70 yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,62% dari tahun anggaran 2013 yang realisasinya sebesar Rp.614.513.936.577,34. Tingginya persentase perkembangan realisasi APBD pada tahun 2014, jika dilihat dari realisasi Pendapatan Daerah disebabkan oleh kenaikan kontribusi dari bagian Pendapatan Asli Daerah khususnya pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Selain itu adanya kenaikan

kontribusi dari bagian Dana Perimbangan yakni pos Dana Alokasi Umum. Begitupula kenaikan kontribusi dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya persentase pertumbuhan terendah pada perkembangan realisasi APBD Kota Parepare terjadi pada tahun anggaran 2012 yang mana pertumbuhannya hanya mencapai 10.26% dari tahun anggaran 2011. Jika dilihat dari realisasi pendapatan daerah, rendahnya perkembangan persentase tersebut disebabkan oleh penurunan kontribusi dari bagian Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada pos Retribusi Daerah. Selain itu disebabkan juga oleh penurunan kontribusi dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara keseluruhan, realisasi APBD Kota Parepare selama tahun anggaran 2010-2014 sudah mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan kenaikan rata-rata 13,89% setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Sedangkan bagian yang lebih berperan pada realisasi APBD khususnya realisasi pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu usaha untuk menggali segala potensi penerimaan yang bersumber dari PAD perlu lebih ditingkatkan.

Perkembangan Target APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Perkembangan target APBD kota Parepare selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun anggaran 2010 sehingga tahun anggaran 2014 mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif. Sama halnya dengan perkembangan realisasinya, pada perkembangan target APBD ada tahun anggaran mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan target APBD tahun lainnya, dan ada pula yang mengalami persentase kenaikan yang kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Perkembangan Target APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Tahun Anggaran	Target	Kenaikan	
		Jumlah	Persentase
2010	497.002.404.415,00	-	-
2011	589.622.580.566,00	92.620.176.151,00	18.64
2012	602.079.669.374,55	12.457.088.808,55	2.11
2013	648.995.986.536,27	46.916.317.162,00	7.79
2014	695.135.725.888,00	46.139.739.352,00	7.11

Sumber: Data APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Berdasarkan data tabel 4 dapat dijelaskan bahwa persentase perkembangan tertinggi pada target APBD Kota Parepare adalah yang dicapai pada tahun anggaran 2011 yaitu Rp.589.622.580.566,00 dengan pertumbuhan sebesar 18,64% dari tahun anggaran 2010 yaitu sebesar Rp.497.002.404.415,00. Tingginya persentase perkembangan target APBD pada tahun 2011 dikarenakan tingginya Dana Perimbangan yang dianggarkan khususnya pos Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Selain itu juga dikarenakan tingginya target APBD yang dianggarkan dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya persentase pertumbuhan terendah pada perkembangan target APBD Kota Parepare terjadi pada tahun anggaran 2012 dengan hanya mengalami peningkatan 2,11% dari tahun anggaran 2011. Jika dilihat dari target pendapatan daerah, rendahnya kenaikan persentase tersebut disebabkan oleh kurangnya Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan, khususnya pada pos Retribusi Daerah. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya dana perimbangan yang dianggarkan, khususnya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Begitupula penganggaran pada bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimana jumlah yang dianggarkan pada pos ini menurun dari tahun anggaran sebelumnya.

Analisis Efektivitas Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare

Efektivitas penerimaan APBD perlu untuk diketahui sebab keberhasilan penerimaan APBD dapat dilihat dari tingkat efektivitasnya. Sedangkan tingkat efektivitas itu sendiri dapat diketahui melalui beberapa indikator, dalam hal ini perbandingan antara target dan realisasi atau sebaliknya yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan APBD Pemda Kota Parepare. Karena pada dasarnya segala bentuk kegiatan yang dikonversi ke dalam angka-angka rupiah, efektivitasnya dapat diketahui dari hasil penentuan target yang dapat direalisasikan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Efektivitas penerimaan APBD tidak hanya terbatas pada kemampuannya untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan tetapi lebih dari itu, dalam hal ini khususnya untuk anggaran daerah. Sebaliknya pada anggaran belanja daerah diusahakan agar realisasi belanja daerah minimal sama dengan yang telah ditargetkan dan suatu keberhasilan jika realisasi pengeluaran ternyata bisa ditekan lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Seperti yang telah dikemukakan dalam teknik analisis data pada bab sebelumnya, bahwa metode penelitian ini menggunakan rumus efektivitas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Halim (2004 : 129) sebagai berikut:

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{Hasil Nyata}}{\text{Sasaran}} \times 100\%$$

Dimana :

Hasil nyata : Realisasi anggaran pada tahun t

Sasaran : Target anggaran pada tahun t

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan APBD kota Parepare tersebut di atas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.

Efektivitas Penerimaan APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Kota Parepare

Tahun Anggaran	Target APBD	Realisasi APBD	Tingkat Efektivitas Penerimaan APBD
2010	497.002.404.415,00	422.485.397.839,81	85.01
2011	589.622.580.566,00	483.240.241.270,12	82.00
2012	602.079.669.374,55	532.812.918.945,64	88.49
2013	648.995.986.536,27	614.513.936.577,34	95.00
2014	695.135.725.888,00	710.496.023.652,70	102.21

Sumber: Data diolah

Selanjutnya hasil analisis data diatas dapat dijabarkan dengan persentase asumsi bahwa jika hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Diatas 100 % = Sangat Efektif
- 90 % - 100 % = Efektif
- 80 % - 90 % = Cukup Efektif
- 60 % - 80 % = Kurang Efektif
- Kurang dari 60 % = Tidak Efektif

Dari tabel 6 terlihat bahwa pada tahun anggaran 2014 realisasi penerimaan APBD yang dicapai mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar

102,21 % atau Rp. 710.496.023.652,70 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 695.135.725.888,00. Sebaliknya pada tahun anggaran 2010 hingga 2013 realisasi penerimaan APBD yang dicapai tidak mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian terendah yaitu pada tahun anggaran 2011, dimana realisasi penerimaan APBD yang dicapai sebesar 82,00 % atau Rp. 483.240.241.270,12 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 589.622.580.566,00.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat empat tahun anggaran realisasi APBD yang tidak mampu melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi penerimaan anggaran daerah selama lima tahun anggaran yang analisa tergolong efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan interval/rentang pengkategorian yang telah ditetapkan sebelumnya dimana tingkat efektifitas penerimaan APBD yang dicapai selama lima tahun terakhir (2010-2014) yaitu rata-rata sebesar 90,54 % atau berada pada interval 90% - 100 % (efektif).

Dengan demikian penerimaan APBD Pemda Kota Parepare selama tahun anggaran 2010-2014 dinyatakan efektif. Hal ini membantah hipotesis yang diajukan sebelumnya bahwa penerimaan APBD Tahun Anggaran 2010-2014 Pemda Kota Parepare adalah kurang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan realisasi APBD Pemda Kota Parepare (selama lima tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2014) mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif dengan rata-rata persentase kenaikan adalah 13,89% setiap tahunnya.
2. Penerimaan APBD Pemda Kota Parepare (selama lima tahun anggaran 2010 hingga tahun anggaran 2014) adalah efektif dilihat dari perbandingan target dan realisasi anggarannya dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 90,54%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat berperan pada realisasi APBD khususnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dalam hal ini perlu lebih ditingkatkan usaha-usaha penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara lebih intensif terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk lebih dikembangkan lagi tingkat pendapatannya.
2. Diharapkan kepada Pemda Kota Parepare, khususnya pada pihak-pihak yang terkait dalam merealisasikan penerimaan APBD, agar tetap dipertahankan efektivitasnya dan terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali H. 2010. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Ratih. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara*

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

- Kunarjo.2003. *Glosarium Ekonomi Keuangan dan Pembangunan*.Jakarta: Press.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Laporan Perhitungan APBD Pemda Kota Parepare Tahun 2010-2014.*
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- _____. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi II. Yogyakarta: Andi.
- Memesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia. Pustaka Umum.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Sabeni, Arifin. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Siagian, P. Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Undang-UndangNo.25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Widjaja, H.A.W. 2012.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.Jakarta: Rajawali Pers.